

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.<sup>1</sup> Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam termasuk ke dalam *jarimah qishash* (tindak pidana yang bersanksi hukum *qishash*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya. Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:

الْمِثْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَرْحُوقُ أَيِ الْمَاتِلِ النَّفْسَ

Artinya : “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2013, Hlm 273

lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberatan yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini akan dilakukan.<sup>2</sup> Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 di Jakarta Pusat yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Pembunuhan yang berlangsung tragis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di putus dengan Nomor Putusan 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst Adalah Putusan atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso yang telah divonis hakim dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atas tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan. Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat dikarenakan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan yang erat pula.

---

<sup>2</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor; 1995. Hlm.241

Perbuatan pidana Jessica Kumala Wongso merupakan kejahatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tentang penentuan mana yang di pandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas Legalitas (*Principle of legality*), yaitu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

”Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Putusan tentang perkara Tindak Pidana Pembunuhan kesengajaan dan Berencana oleh Jessica Kumala Wongso adalah putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarekan menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jessica Kumala Wongso setelah upaya upaya hukum Kasasi yang diajukan ditolak MA pada 21 Juni 2017.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan dimana memuat unsur yang memberatkan (*gequalificeerde doodslag*), yaitu yang berupa unsur perencanaan (*voorbedachte raad*).

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat di pidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya.

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>3</sup>

Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.<sup>4</sup>

Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).<sup>5</sup> Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP

---

<sup>3</sup> Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung; Cipta Adya Bakti. 1994. Hlm 89

<sup>4</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, " *Hukum Pidana*" Ghalia Indonesia, 1990, Jakarta; Hlm. 45.

<sup>5</sup> Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta; Pt. Raja Grafindo. 2010. Hlm. 57

diatas, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara dua puluh tahun.

Menanggapi pledoi penasehat hukum terdakwa Jessica sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna, karena menurut terdakwa tidak pernah meras melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut menjadi tolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di indonesia menganut (sistem juri) seperti yang berlaku di amerika serikat, maka pasti terdakwa jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya penasehat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di indonesia menganut (*civil law*) bukan (*common law*) artinya sistem hukum indonesia tidak menganut (sistem juri) seperti dianut di Amerika serikat, membuktikan bahwa penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sesungguhnya sangat mengetahui bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan akan di jatuhi pidana sesuai dalam pertimbangan hukum unsur-unsur dakwaan jaksa.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan PN Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst.

---

<sup>6</sup> Putusan PN Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Hlm 212

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas tersebut, dapat dilakukan suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst yang sebagaimana dalam putusan tersebut pelaku dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara dan melihat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam pelaku harus dijatuhi hukuman *qishash*. Oleh karena itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 777/Pid.B/PN.Jkt.Pst. Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Jessica Kumala Wongso ?
2. Bagaimana sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst. Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Jessica Kumala Wongso Perspektif Hukum Pidana Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Jessica Kumala Wongso.
2. Untuk Mengetahui Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Jessica Kumala Wongso.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

## E. Kerangka Pemikiran

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan kehidupan seseorang.

<sup>7</sup>Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari pasal 338-350. Pembunuhan didalam KUHP terbagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan.

Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*) disini diperlakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah *At-Tasyri al-Jina 'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ali Bahasa: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*. Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor; Hlm. 177

<sup>8</sup> Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta; h. 37

Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain di ancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.<sup>9</sup> Kedua pasal tersebut sama sama mengatur tindak pidana pembunuhan namun keduanya mempunyai perbedaan dalam hal pelaksanaan hukuman.

Hukum positif Indonesia mengatur pembunuhan berencana dalam pasal 340 dengan sanksi pidana maksimal hukuman mati. Pidana mati yang ditetapkan undang-undang tidak terlepas dari pendapat sarjana hukum yang pro terhadap pidana mati pada waktu itu. Alasan ditetapkannya hukuman mati pada saat itu adalah sebagai berikut: <sup>10</sup>

1. Pidana mati menjamin bahwa penjahat tidak akan berkulik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi pelaku sebab mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut terhadap terpidana.
2. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama bagi pemerintah hindia belanda
3. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.

---

<sup>9</sup> *Ibid* . hlm. 241

<sup>10</sup> J. E Sahetapy. *Suatu Studi Khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*. Jakarta; CV Rajawali. Hlm. 47



4. Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).<sup>11</sup>

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst. merupakan kasus yang menjerat Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku pembunuhan yang dijerat pasal 340 KUHP karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Wayan Mirna Salihin dijatuhkan sanksi oleh majelis hakim berupa hukuman penjara dua puluh tahun.

Tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah*, dalam istilah tersebut ada dua istilah penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, ada istilah *Jinayah* itu sendiri dan kedua, adalah *Jarimah*. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama.<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-Jina 'Al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah yaitu jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.

Tindak pidana yang sanksinya diatur langsung oleh al-Qur'an atau Hadits ada dua jenis dan masing-masing mempunyai hukum yang berbeda, yaitu:<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta; Pt. Raja Grafindo. 2010. Hlm 57

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung; Pustaka Setia. 2010.

<sup>13</sup> Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3, h, 7.

- a. Tindak pidana *hudud* yang terbagi menjadi tujuh, yaitu zina, Qadzaf, minuman keras, mencuri, hirabah, murtad dan memberontak. Hukum Islam telah meletakkan hukuman tertentu bagi ketujuh tindak pidana tersebut dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya, atau mengganti dengan hukuman yang lainnya.
- b. Tindak pidana *qisash/diyat*, yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan baik sengaja maupun tersalah, yaitu pembunuhan disengaja pembunuhan menyerupai disengaja pembunuhan tersalah, pelukaan disengaja dan pelukaan tersalah. Hukum Islam meletakkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana tersebut yaitu *qisash/diyat* dalam keadaan sengaja serta *diyat* dalam keadaan tersalah. Dalam hal ini hakim diharamkan mengurangi menambah atau mengganti kedua hukuman tersebut. Maka dari itu siapa yang melakukan salah satu tindak pidana ini maka akan dijatuhi hukuman yang telah ditentukan, tanpa memandang keadaan atau diri pelaku tindak pidana tersebut.

Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam tentunya berhubungan dengan salah satu *maqasid asy-syari'ah al-khams* yaitu memelihara jiwa. Larangan membunuh orang-orang yang diharamkan Allah banyak tercantu dalam al-Qur'an di antaranya al-Maidah (5) ayat 32.

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.”.<sup>14</sup>

Adapun ayat yang menjatuhkan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam tercantum dalam surat al-Baqarah (2) ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang membayar) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengancara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>15</sup>

Ulama hanafiyah dan hanabila membagi tiga bentuk pembunuhan yaitu:

1. Pembunuhan disengaja, yaitu merampas nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.
2. Pembunuhan tidak sengaja, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja namun perbuatan tersebut tidak ditunjukan kepada korban jadi matinya korban tidak diniati.

<sup>14</sup> Soenaryo dan kawan-kawan “*al-Qur’an dan Terjemahnya*”. Surat al-Maidah (5) Ayat 32. Hal 113

<sup>15</sup> Soenaryo dan kawan-kawan “*al-Qur’an dan Terjemahnya*”. Surat al-Baqarah” (2) ayat 178. Hal 27

3. Perbuatan seperti disengaja, mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayid Sabiq yang dilakukan oleh sejumlah sahabat, seperti, Umar bin Khatab, Ali bin Abu Thalib, Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit. Pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud tetapi tidak mengadili kematian korban, kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban tidak bermaksud menghilangkan nyawanya.

Jenis pembunuhan yang sanksinya hukuman mati adalah pembunuhan disengaja. Dan dikatakan pembunuhan disengaja jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya
- b. Perbuatan itu membawa kematian
- c. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Kasus pembunuhan yang menyeret Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa pelaku pembunuhan Korban Wayan Mirna Salihin terjerat sanksi pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman dua puluh tahun dan dalam hukum pidana islam seharusnya dikenakan sanksi hukuman mati karena perbuatan Jessica Kumala Wongso Masuk kedalam pembunuhan disengaja sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukum *Qishash*.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang artinya penelitian yang bersifat pembahasan dalam terhadap isi suatu informasi

tertulis atau tercetak dalam media massa. Didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini.

## 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari direktorat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis data yang dikumpulkan bersifat tertulis dalam bentuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Sumber data

Untuk menghindari melebar nya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kitab Abdul Qadir Audah yang berjudul *At-Tasyri al-Jina 'l al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wd'iy*, yang telah diterjemahkan ke dalam Ensiklopedi Hukum Pidana

Islam Jilid III. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta buku hukum pidana Islam dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/Jkt.Pst.
- b. Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku tentang masalah yang dikaji.

#### 5. Analisi data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan serta menelaah seluruh data yang diperoleh dari direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Kalsifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, serta studi kepustakaan.
- c. Menghubungkan satu sama lain data yang sudah ada.
- d. Mengolah dan menganalisis data yang di dapat terkait penelitian.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan.